

JURNAL

KONSISTENSI FATWA DSN NO: 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH TERHADAP PASAL 1 ANGKA 1 DAN ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD ARIEF EKA PUTRA
NIM. 105010100111021



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Jurnal : **KONSISTENSI FATWA DSN NO: 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH TERHADAP PASAL 1 ANGKA 1 DAN ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN**

Identitas Penulis :

a. Nama : **Muhammad Arief Eka Putra**

b. NIM : **105010100111021**

c. Konsentrasi : **Hukum Ekonomi Dan Bisnis**

Jangka Waktu Penulisan : **5 Bulan**

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 196606221990022001

Djumikasih, S.H., M.Hum.
NIP. 196606221990022001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Djumikasih, S.H., M.Hum.
NIP. 196606221990022001

**KONSISTENSI FATWA DSN NO: 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG
PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH TERHADAP PASAL 1
ANGKA 1 DAN ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992
TENTANG USAHA PERASURANSIAN**

Muhammad Arief E. P., Siti Hamidah, S.H., M.M., Djumikasih, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Email : oxo_ekaputra_oxo@yahoo.com

Abstrak

Penelitian membahas persoalan terkait adanya benturan tentang konsep Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi bila dikaji berdasarkan hukum Islam mengenai *fiqh muamalat*. Disamping itu juga terkait adanya kekosongan hukum yang terjadi pada Fatwa DSN 21/DSN-MUI/X/2001 terkait masalah obyek *takaful*. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis mengangkat rumusan masalah: bagaimana konsistensi Fatwa DSN No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah terhadap Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian? Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya pertimbangan dari pihak yang berwenang membuat UU Asuransi mengenai konsistensi Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi yang dikarenakan pasal tersebut masih mengandung unsur *gharar* dan lebih menguntungkan satu pihak, sehingga tidak cocok jika diterapkan. Hal ini jelas sangat merugikan masyarakat yang beragama Islam ketika berkeinginan untuk menggunakan fasilitas asuransi konvensional. Selain hal tersebut, Fatwa *Takaful* mengalami kekosongan hukum mengenai obyek *takaful*. Dengan munculnya masalah kekosongan hukum tentang obyek *takaful*, perlu adanya penyempurnaan dengan langkah penambahan substansi obyek *takaful* pada Fatwa *Takaful* oleh DSN-MUI sebagai pihak yang mempunyai kewenangan. Salah satu caranya dengan mengadopsi Pasal 1 Angka 2 UU Asuransi dengan sedikit modifikasi untuk menghilangkan obyek asuransi yang dilarang oleh Islam.

Kata Kunci: *Takaful*, Asuransi, Konsistensi., dan Fatwa.

**DSN FATWA CONSISTENCY NO: 21 / DSN-MUI / X / 2001 GENERAL
GUIDELINES OF TAKAFUL ABOUT TO ARTICLE 1 POINT 1 AND POINT
2 OF LAW NUMBER 2 YEAR 1992 ON BUSINESS INSURANCE**

Muhammad Arief E. P., Siti Hamidah, S.H., M.M., Djumikasih, SH, M. Hum.

Faculty of Law Universitas Brawijaya Malang

Email: oxo_ekaputra_oxo@yahoo.com

Abstract

This research discusses issues related to conflict about concept of Article 1 Point 1 of the Law of Insurance when assessed on the basis of Islamic law regarding Fiqh Muamalat. Besides, it is also related to rechtsvacuum that occurred on DSN Fatwa No: 21 DSN / DSN-MUI / X / 2001 related issues takaful object. Based on the foregoing, the authors raised the formulation of the problem: how consistency DSN No: 21 / DSN-MUI / X / 2001 on General Guidelines for Sharia Insurance against Article 1 Number 1 and Number 2 of Law No. 2 of 1992 on Business Insurance? The results showed that there needs to be consideration of the authorities make Insurance Act regarding the consistency of Article 1 Point 1 of the Law of Insurance that because the article still contains gharar and more profitable one side, so it is not suitable if applicable. It is obviously very detrimental to the Muslim community when wishing to use the facilities of conventional insurance. In addition to this, the Fatwa Takaful experienced legal vacuum on the object of takaful. With the emergence of the problem of object takaful legal vacuum, the need for improvement with the addition of the substance of the object move on Fatwa Takaful Takaful by DSN-MUI as the party that has the authority. One way by adopting Article 1 Point 2 of the Law of Insurance with a slight modification to eliminate the insurance object which is prohibited by Islam.

Keywords: Takaful, Insurance, Consistency., and Fatwa.

A. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian di negara Indonesia cukup dapat dibanggakan. Salah satu wujud perkembangan perekonomian yakni banyak berdiri lembaga keuangan yang bergerak dibidang ekonomi. Lembaga keuangan termasuk menjadi tonggak kebangkitan perekonomian nasional. Tidak hanya lembaga keuangan yang berbentuk bank saja, lembaga non-bank pun mempunyai peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian di negara Indonesia, misalnya asuransi.

Perkembangan asuransi tidak berhenti pada satu konsep saja, ada alternatif lain bagi masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas asuransi, yakni *takaful*. *Takaful* secara sederhana dikatakan sebagai asuransi bernuansa Islami yang lebih condong pada kegiatan sosial daripada kegiatan yang mengutamakan *profit oriented* (keuntungan bisnis), dikarenakan aspek tolong menolong menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam¹ dan akibat penggabungan dua visi yang berbeda, yaitu visi sosial yang menjadi landasan utama dan visi ekonomi yang merupakan landasan perifer².

Takaful merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.³ Secara asuransi umum, *takaful* dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syari'at Islam atau prinsip syari'ah⁴ dengan mengacu pada al-Qur'an dan Sunnah.⁵

¹Euis Lia Karwati, **Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Kerugian Syariah (Studi Pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967)**, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah, 2011, hlm. 2, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/273/1/101540-EUIS%20LIA%20KARWATI-FSH.PDF> , (Diunduh tanggal 14 Juli 2014).

²Hasan Ali, **Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Historis**, Teoritis, dan Praktis, Kencana, Jakarta, Tahun 2006, hlm. 55.

³Ketentuan Umum Nomor 1 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (selanjutnya disebut Fatwa DSN) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

⁴Menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867), selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah, **prinsip syariah** adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang

Eksistensi *takaful* di Indonesia mulai tampak ketika salah satu produk hukum, yakni Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syaria'ah (selanjutnya disebut Fatwa *Takaful*) dibuat oleh DSN sebagai payung hukum asuransi syariah. DSN merupakan bentukan Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam.⁶ DSN membuat Fatwa *Takaful* tersebut untuk mengisi *rechtsvacuum* terhadap sistem pengaturan *takaful* dan dijadikan sebagai acuan dalam pengimplementasian konsep *takaful* itu sendiri.

Dalam perjalanannya, keberadaan dua konsep asuransi, yakni asuransi konvensional dan *takaful* menunjukkan keadaan yang saling berbenturan, meskipun sama-sama bergerak guna untuk menjamin risiko yang terjadi pada seseorang. Dukungan dari produk hukum andalan dari kedua konsep asuransi tersebut, untuk menjamin pelaksanaan, dalam hal ini UU Asuransi dari asuransi konvensional dan Fatwa *Takaful*, tidak selamanya berjalan selaras. Pro dan kontra dari berbagai elemen menjadi salah satu topik permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Beberapa persoalan yang terlihat dalam produk hukum dari dua konsep asuransi tersebut menjadi sasaran utama bagi pengamat dunia perasuransian yang ingin memecahkan persoalan tersebut.

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah menurut Abdurrahman (2009 : 127) dalam bukunya yang berjudul "Asuransi Syariah" mengatakam bahwa prinsip syariah meliputi tidak mengandung *gharar* (ketidak jelasan), *maisir* (perjudian), *riba*, *zulum* (penganiayaan), dan *riswah* (suap dan barang haram dan maksiat). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi (selanjutnya disebut KEPMENKEU-RI Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asurans Dan Perusahaan Reasuransi) juga menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dengan pihak lain, dalam menenrima amanah dengan mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah.

⁵H. A. Djazuli dan Yadi Junwari, **Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2002, hlm. 120.

⁶DSN-MUI, **Sekilas tentang DSN-MUI** (Online), <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas> , (Diakses tanggal 16 Agustus 2014).

Lahirnya UU Asuransi dan Fatwa *Takaful* menjadi salah satu awal munculnya kontroversi diantara keduanya. Dari beberapa substansi yang ada menciptakan benturan apabila dicermati dengan seksama. Untuk mengetahui persoalan tersebut, perlu dilihat dari beberapa sudut pandang, tidak bisa melalui satu sudut pandang saja, misalnya substansi yang terkandung dalam UU Asuransi dianggap telah sesuai apabila dipantau dari sudut pandang asuransi konvensional, sedangkan jika dilihat dari sudut pandang Islam kemungkinan belum tentu cocok dengan prinsip syari'ah.

Bersamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis ini, setelah mencermati dengan membaca UU Asuransi dan Fatwa *Takaful*, penulis menemukan sebagian permasalahan yang kemudian menjadi topik perbincangan dari penelitian ini, meliputi:

1. Dilihat dari kacamata syariah Islam, Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi yang menjelaskan pengertian asuransi secara garis besar, tidak menciptakan keselarasan apabila dihubungkan dengan pengertian *takaful* dalam Penetapan Pertama Angka 1 Fatwa *Takaful*.

Kedua pengertian dalam masing-masing ketentuan hukum, terlihat perbedaan konsep yang signifikan. Penulis menganggap pengertian dari asuransi konvensional melanggar konsep syariah dan lebih menguntungkan pihak asuransi daripada pihak tertanggung. Lain halnya dengan konsep *takaful* dimana usaha saling melindungi dan tolong-menolong menjadi senjata utama demi tercapainya syariah Islam yang hakiki.

Yang menjadi sorotan utama bagi penulis adalah bagaimana konsistensi kedua pengertian bagi masyarakat, khususnya umat Islam? Bagaimana dampak kedepannya dengan adanya perbedaan konsep pengertian dasar dalam kedua payung hukum tersebut?

Dengan adanya hal ini, penulis juga mengharapkan dapat menemukan perbandingan antara keduanya dengan meninjau kedua pedoman hukum ditambah materi-materi dalam berbagai literatur buku dan lainnya.

2. Fatwa *Takaful* tidak menjelaskan persoalan mengenai obyek apa saja yang dapat di-*takaful*-kan dan obyek apa aja yang diperbolehkan untuk di-

takaful-kan menurut syari'at Islam. Lain halnya dengan UU Asuransi yang secara tegas menjelaskan obyek-obyek yang dapat diasuransikan dimana ketentuan tersebut tercantum dan dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 UU Asuransi.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah *takaful* menggunakan semua obyek asuransi yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 UU Asuransi dalam pelaksanaannya? dan apakah semua obyek asuransi konvensional dapat dikatakan memenuhi prinsip syariah sehingga dapat diterapkan pada konsep *takaful*?

Persoalan yang telah diurai diatas menunjukkan bahwa kontribusi UU Asuransi dan Fatwa *Takaful* sebagai landasan pelaksanaan sistem asuransi belum mencapai kesempurnaan. Dualisme tersebut perlu adanya rekonstruksi dengan melakukan sinkronisasi untuk menciptakan keselarasan yang nantinya dapat berdampak bagus bagi masyarakat sebagai sasaran utama, khususnya mempermudah masyarakat dalam memahami dan menggunakan fasilitas asuransi.

B. Masalah/Isu Hukum

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang menjadi pedoman bagi penulis untuk mengembangkan penelitian yaitu:

Bagaimana konsistensi Fatwa DSN No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah terhadap Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian?

C. Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dan dianalisis menggunakan metode penafsiran (interpretasi). Metode penafsiran yang digunakan penulis adalah penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran komparatif.

Pembahasan penelitian ini terbagi dalam beberapa sub bab untuk menjaga keruntutan selama pembahasan. Pembahasannya sebagai berikut:

a. Analisis Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Penulis berpendapat bahwa fatwa DSN dapat dikatakan sebagai produk hukum. Dasar pendapat tersebut adalah selain fatwa DSN dibuat dengan berdasarkan pada sumber hukum Islam yang sudah terbukti kebenarannya dan kekuatannya, yakni Al-Qur'an, Hadits, *Ijma'*, dan *Qiyas*, dan dibuat oleh *mujtahid* yang memiliki integritas tinggi, ada beberapa dasar untuk mengatakan fatwa DSN dapat disebut produk hukum. Dasar tersebut meliputi:

1. Fatwa DSN-MUI dibuat dengan menimbang dari beberapa sumber hukum Islam yang telah ada, yaitu Al-Qur'an, *Hadits*, *Ijma'*, dan *Qiyas*, yang menjadikan Fatwa DSN-MUI dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keabsahannya, khususnya bagi umat Islam. Sumber hukum Islam tersebut tidak akan pernah lepas dari kegiatan ekonomi yang berbasis syariah.
2. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) jo. Ayat (2) jo. Ayat (3) UU Perbankan Syariah, fatwa DSN-MUI mendapat pengakuan hukum (dipositivisasi) dari Peraturan Bank Indonesia, terutama mengenai penetapan Prinsip Syariah. Pasal 26 Ayat (1) jo. Ayat (2) jo. Ayat (3) UU Perbankan Syariah menyatakan:

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Hal ini menjadikan fatwa DSN mempunyai daya ikat untuk dijalankan dalam kegiatan perekonomian dan keuangan dibidang syariah pada umumnya yang memegang Prinsip Syariah dalam pelaksanaannya.

3. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) yang

secara tegas membahas perkara di berbagai bidang kehidupan sebagai salah satu wewenang Peradilan Agama.⁷

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Dengan diaturnya beberapa urusan dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama, menjadikan fatwa DSN-MUI yang notabene dibuat DSN-MUI untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam⁸, mempunyai ruang untuk membantu menyelesaikan perkara di ranah Peradilan Agama. Hal tersebut terbukti terjadi pada putusan kasus yang berkaitan dengan ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bantul, yaitu Putusan No. 0700/pdt.G/2011/PA.btl. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* dan Yurisprudensi MA No. 2899/K/Pdt/1994 menjadi sumber hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 0700/pdt.G/2011/PA.btl mengenai tuntutan dan gugatan ganti rugi atas nisbah, dwangsong dan pengembalian modal.⁹ Berdasarkan bukti tersebut, penulis berani mengatakan bahwa Fatwa DSN-MUI dapat digolongkan ke dalam

⁷Pesantren Virtual oleh Agustianto, *loc.cit.*

⁸ Dikutip dari latar belakang dan tugas & wewenang DSN-MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama, Tahun 2013-2014, **Sekilas Tentang DSN MUI** (*Online*), <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas>, (Diakses tanggal 27 Januari 2015).

⁹ Sebelumnya dibahas secara detail oleh Fitriawan Sidiq, **Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul**, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2013, <http://digilib.uin-suka.ac.id/7751/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (Diunduh tanggal 27 Januari 2015).

produk hukum dengan alasan bahwa Fatwa DSN-MUI dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, khususnya yang menyangkut masalah ekonomi syariah.

4. Dalam Pasal 31 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah menyebutkan bahwa “untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan untuk memperhatikan fatwa DSN-MUI”. Fatwa DSN-MUI dalam pasal ini diposisikan sebagai penentu standar Prinsip Syariah yang akan digunakan nantinya oleh bank umum syariah dalam kegiatan-kegiatan usahanya.
5. Fatwa DSN-MUI dapat dipakai untuk pedoman hukum atau peraturan pelaksana dalam menjalankan kegiatan tertentu. Penulis ambil contoh Fatwa *Takaful* yang kebetulan menjadi obyek penelitian skripsi ini. Fatwa *Takaful* dijadikan pedoman dasar oleh perusahaan asuransi murni syariah dan perusahaan asuransi konvensional yang mempunyai cabang khusus syariah dalam menjalankan kegiatan didalamnya.

b. Substansi Fatwa DSN-MUI No:21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah dan Analisisnya

Berdasarkan dasar menimbang Fatwa *Takaful*, MUI sangat memperhatikan masyarakat pada umumnya dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, terutama ketika seseorang menghadapi risiko yang sewaktu-waktu dapat menimpa. MUI dengan Fatwa *Takaful*-nya memberikan solusi kepada seseorang agar sebelum risiko atau musibah datang, asuransi dapat menjadi salah satu alternatif bagi seseorang tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang timbul dari adanya risiko atau musibah yang mungkin datang secara tiba-tiba, tanpa menghendaknya. Alasan lain MUI mengesahkan Fatwa *Takaful* adalah menjawab persoalan mengenai status hukum dan cara menjalankan perusahaan asuransi yang selama ini menjadi bahan perdebatan di kalangan para ulama masa kini. Secara garis besar para ulama terbagi kepada dua kelompok, yaitu kelompok yang mengharamkan dan kelompok yang membolehkan asuransi.

Fatwa *Takaful* terbagi dalam 11 ketentuan yang masing-masing membahas apa saja yang termuat dalam kegiatan *takaful*, yaitu:

1. Ketentuan ke-1 membahas ketentuan umum *takaful*;
2. Ketentuan ke-2 membahas *akad* dalam *takaful*;
3. Ketentuan ke-3 membahas kedudukan para pihak dalam *akad tijarah & tabarru'*;
4. Ketentuan ke-4 membahas ketentuan dalam *akad tijarah & tabarru'*;
5. Ketentuan ke-5 membahas jenis asuransi dan *akadnya*;
6. Ketentuan ke-6 membahas premi;
7. Ketentuan ke-7 membahas klaim;
8. Ketentuan ke-8 membahas investasi;
9. Ketentuan ke-9 membahas reasuransi;
10. Ketentuan ke-10 membahas pengelolaan asuransi syariah;
11. Ketentuan ke-11 membahas ketentuan tambahan (pengawasan, penyelesaian sengketa dan opsi perbaikan jika terjadi kekurangan).

c. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian secara Umum

Rumusan Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 KUHD. Di dalam Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi ruang lingkupnya tidak hanya membahas asuransi kerugian, tetapi juga membahas asuransi jiwa. Hal ini dapat diketahui dari kata-kata bagian akhir rumusan, yaitu “untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”. Dengan demikian objek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan, tetapi juga jiwa/raga manusia.

Untuk memahami lebih lanjut, berikut ini disajikan perbandingan antara rumusan Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi dan Pasal 246 KUHD:¹⁰

1. Definisi dalam UU Asuransi meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian dibuktikan oleh bagian kalimat “penggantian karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan”. Asuransi jiwa dibuktikan oleh bagian kalimat “memberikan

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Asuransi Indonesia**, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Keempat Tahun 2006. hlm. 11-12.

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang”. Bagian ini tidak ada dalam definisi Pasal 246 KUHD.

2. Definisi dalam UU Asuransi secara eksplisit meliputi juga asuransi untuk kepentingan pihak ketiga. Hal ini terdapat dalam bagian kalimat “tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga”. Bagian ini tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.
3. Definisi dalam UU Asuransi meliputi objek asuransi berupa benda, kepentingan yang melekat atas benda, sejumlah uang dan jiwa manusia. Objek asuransi berupa jiwa manusia tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.
4. Definisi dalam UU Asuransi meliputi evenemen berupa peristiwa yang menimbulkan kerugian pada benda objek asuransi dan peristiwa meninggalnya seseorang. Peristiwa meninggalnya seseorang tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat diidentifikasi beberapa unsur yang harus ada pada asuransi, yaitu:

- a. Adanya penanggung dan tertanggung;
- b. Ada suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih;
- c. Obyek asuransi dan kepentingan tertanggung;
- d. Tujuan yang ingin dicapai;
- e. Risiko;
- f. Premi;
- g. *Evenemen* (peristiwa yang tidak pasti);
- h. Ganti kerugian;
- i. Syarat yang berlaku.

Bersamaan dengan penelitian penulis yang salah satunya mengambil tema Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi yang dihubungkan dengan konsep syariah Islam dan dibandingkan dengan Fatwa *Takaful*, perlu dipertanyakan mengenai konsistensi Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi tersebut dalam ruang lingkup operasional asuransi di Indonesia, di mana mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Landasan penulis mempertanyakan hal tersebut karena bersamaan masih adanya perdebatan

dikalangan ulama mengenai status halal haramnya kegiatan asuransi konvensional dan berdasarkan identifikasi penulis dengan berpedoman hasil penelusuran bahan hukum sementara menyatakan Pasal 1 Angka 1 cenderung melanggar kaidah Islam dan memasung hak umat Islam yang akan menggunakan fasilitas asuransi konvensional akibat kecenderungan mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam transaksi *muamalat*. Untuk menjawab teka teki itum penulis akan membahasnya pada sub bab selanjutnya.

d. Analisis Konsistensi Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah terhadap Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Berdasarkan sumber bahan hukum yang sudah dikaji, penulis berpendapat dalam skripsi ini bahwa Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi menunjukkan adanya pelanggaran terhadap konsep syariat Islam dalam bermuamalah yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi apabila dijadikan pedoman bagi umat Islam di Indonesia yang berkeinginan untuk mengangsurasikan kepentingannya secara konvensional dan sangat bertolakbelakang dengan konsep pengertian asuransi menurut Fatwa *Takaful*. Dasar penulis mengatakan Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi melanggar konsep muamalat Islam sebagai berikut:

1. Mengandung Unsur *Gharar*

Dalam pasal tersebut, penulis menemukan potongan kalimat yang menunjukkan Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi mengalami inkonsistensi jika dikaji berdasarkan konsep prinsip syariah, yaitu kalimat “suatu peristiwa yang tidak pasti”. Kutipan kalimat tersebut menunjukkan bahwa adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang jelas-jelas tidak diperbolehkan dalam Islam, lebih tepatnya lagi penulis menghubungkannya dengan pengelolaan dana (premi) dalam asuransi konvensional. *Gharar* menurut penulis adalah suatu keadaan di mana kuantitas, kualitas, waktu dan hasil dari suatu transaksi tidak dapat diketahui secara pasti, dalam arti masih dalam batas spekulasi (*maysir*).

Meskipun penulis tidak menemukan *nash* di Al-Qur'an yang menjelaskan *gharar*, penulis menemukan Hadits" yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya mengenai larangan transaksi yang mengandung *gharar*. Hadits tersebut adalah riwayat H.R. Muslim dari Abu Hurayrah. Dalam Hadist ini disebutkan bahwa "*Rasulullah SAW, bersabda: melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya)*".¹¹ Dari Hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang tidak bisa ditentukan harga, barang, waktu dan tempatnya tergolong dalam transaksi yang mengandung *gharar* dan secara tidak langsung melanggar kaidah Islam dalam bermuamalat.

Mengenai kalimat "suatu peristiwa yang tidak pasti" dalam Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi, penulis mengidentifikasi bahwa peristiwa tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian, yang meliputi:

- a. Bentuk peristiwa itu bagaimana?;
- b. Kapan peristiwa itu datang?;
- c. Apa penyebab peristiwa itu muncul?;
- d. Apa risiko dari peristiwa tersebut?; dan
- e. Bagaimana mengatasi apabila peristiwa itu muncul?

Apabila dikaji berdasarkan pengelolaan dana (premi) dalam asuransi konvensional, *gharar* sangat terasa pada saat itu. Ketidakjelasan tersebut dapat dibuktikan dengan pertanyaan "bagaimana proses perputaran premi yang dibayarkan tertanggung apabila tertanggung tidak mengalami risiko?".

Di samping itu, berkaca pada penelusuran bahan hukum yang dituangkan dalam penjelasan singkat di atas pada sub bab ini, tidak ada penjelasan mengenai *gharar* diperbolehkan dalam asuransi, baik di kubu ulama yang mengharamkan asuransi maupun ulama yang memperbolehkan asuransi. Sebenarnya asuransi konvensional dapat terbebas dari unsur haram apabila pengelolaannya dilakukan secara

¹¹ Sofyan Efendi, 27 Maret 2006, **HaditsWeb 6.0 (Kumpulan & Referensi Belajar Hadits)**, Tahun 2006.

pasti tanpa menyimpang dengan ketentuan lain, terutama ketentuan hukum Islam yang sangat sensitif.

2. Cenderung Lebih Menguntungkan Perusahaan Asuransi

Mengapa penulis mengatakan seperti ini? Berdasarkan potongan pengertian Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi, yakni:¹²

“...pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Penulis mengidentifikasi dengan pertanyaan yang ditujukan pada potongan pengertian tersebut apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, guna menunjukkan inkonsistennya Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi. Pertanyaan tersebut sebagai berikut:

- a. Bagaimana apabila peristiwa “kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan” tidak terjadi?;
- b. Bagaimana dengan premi yang dibayarkan tertanggung apabila peristiwa tersebut tidak terjadi? Apakah dikembalikan atau bagaimana?

Dengan munculnya pertanyaan tersebut, penulis menganggap adanya ketidakpastian hukum mengenai pengaturan asuransi konvensional yang diwakili oleh pengertian Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi. Di samping itu, penulis dalam menelusuri UU Asuransi beserta peraturan yang terkait, misalnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK 06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK. 06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, kecuali mengenai dasar penentuan besarnya

¹² Diambil dari sebagian Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi.

premi dengan menggunakan tabel moralitas (asuransi jiwa) dan tabel morbidita (asuransi kesehatan), tidak ditemukan penjelasan mengenai pengelolaan masuk keluarnya premi yang menurut penulis sebagai keadaan yang cenderung tidak transparan dan memungkinkan hanya menguntungkan pihak perusahaan asuransi saja.

Lain halnya dengan Fatwa *Takaful* yang menyinggung premi didalamnya. Dalam Penetapan Keenam Mengenai Premi disebutkan bahwa premi dikelola dengan akad *tijarah* dan akad *tabarru'* di mana kedua akad tersebut dilarang memasukkan unsur riba dalam penghitungannya, karena riba dilarang oleh Islam, sebagaimana disebut dalam ayat Al-Qur'an:

- 1) Q.S. Al-Baqarah (2) : 275;
- 2) Q.S. Al-Baqarah (2) : 276;
- 3) Q.S. Al-Baqarah (2) : 278;
- 4) Q.S. Ali Imran (3): 130;
- 5) Q.S. Ar-Ruum (30): 39.

Premi dalam Fatwa Takaful dikelola oleh perusahaan dan dapat diinvestasikan dan hasilnya dibagi-bagikan kepada peserta. Dalam arti demi kesejahteraan semua pelaku yang sebenar-benarnya.¹³

Kedua dasar tersebut cukup memberikan alasan untuk mengatakan bahwa Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi tidak selaras dan tidak sesuai apabila diterapkan, bahkan melanggar kaidah *fiqh muamalat* dalam Islam dan cenderung merugikan pelaku usahanya dibanding memberikan manfaat dan kesejahteraan. Perlu adanya tindakan untuk mengkondusifkan asuransi konvensional, khususnya memperbaiki Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi.

e. Solusi Memperbaiki Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Berpedoman Fatwa Takaful

Keadaan yang tidak sesuai dengan pranata hukum nasional dan hukum Islam akibat terjadinya ketimpangan atau inkonsistensi dari Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi mengakibatkan perlunya suatu tindakan dari

¹³ Lihat Penetapan Keenam Fatwa *Takaful* yang menjelaskan tentang Premi.

pemerintah, dalam arti badan legislatif yang berwenang membuat undang-undang untuk segera mengatasi hal tersebut guna menghindarkan pelaku usaha asuransi, terutama masyarakat yang beragama Islam dari hal-hal yang dapat merugikan, baik merugikan dari segi materiil maupun spiritual. Penulis berpendapat dan memberikan solusi untuk mengatasi hal tersebut dengan langkah sebagai berikut:

1. Apabila melihat bunyi Penetapan Pertama Angka 1 Fatwa *Takaful* yang menyebutkan:

Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah Berdasarkan pengertian asuransi syariah menurut Fatwa *Takaful* yang cenderung mengutamakan prinsip saling tolong-menolong dan terbebas dari hal-hal yang dapat merugikan, dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi, dalam arti perlu dilakukannya pengadobsian sebagai langkah sinkronisasi hukum secara luas (membandingkan, melengkapi satu sama lain, dan menyempurnakan) terhadap Fatwa *Takaful*. Penulis mengusulkan perumusan bunyi Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi sebagai berikut:

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, saling melindungi dan tolong-menolong, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung.

2. Langkah yang paling ekstrim menurut penulis adalah dilakukannya penghapusan Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi dan menggantikannya dengan perumusan pasal baru dengan mempertimbangkan unsur filosofis, sosiologis, yuridis dan agamis/spiritual untuk mencapai nilai-nilai dasar dalam hukum.¹⁴

¹⁴ Menurut Radbruch, nilai-nilai dasar dari hukum adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Dalam Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Keenam Tahun 2006, hlm. 19.

f. Permasalahan Kekosongan Hukum Dalam Fatwa DSN Mengenai Obyek Yang Dapat Ditakafulkan

Kondisi Fatwa *Takaful* yang “pincang” akibat tidak diatur obyek *takaful* menyebabkan adanya kekosongan hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan asuransi berbasis syariah, baik perusahaan asuransinya maupun konsumennya. Keadaan seperti ini memungkinkan terjadinya multitafsir dari pelaku asuransi yang awam dengan menyamakan obyek asuransi konvensional yang termuat dalam Pasal 1 Angka 2 UU Asuransi) dengan obyek asuransi syariah. Latarbelakang asuransi konvensional yang lebih menjangkau masyarakat dan minimnya pengetahuan masyarakat akan asuransi syariah memperbesar peluang terjadinya hal tersebut. Ketika hal tersebut benar-benar terjadi, yang dipertanyakan itu apakah mungkin semua obyek asuransi konvensional (Pasal 1 Angka 2 UU Asuransi) diadopsi dan diterapkan dalam asuransi syariah yang dinahkodai oleh Fatwa *Takaful* di mana posisi asuransi konvensional beserta ruang lingkup didalamnya, salah satunya mengenai obyeknya, masih memunculkan perdebatan status halal haram dibenak ulama dan umat Islam di Indonesia bahkan dunia? Oleh karena itu, perlu segera dilakukan langkah jitu untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut yang cenderung memunculkan kebingungan dan keraguan masyarakat luas. Hal ini perlu dilakukan demi menjaga konsistensi Fatwa *Takaful* yang notabene sebagai peraturan utama perusahaan asuransi syariah dalam menjalankan operasionalnya. Di samping itu, untuk mencapainya kepastian hukum syariah di mata semua pelaku asuransi syariah sehingga menghilangkan segala keraguan yang mungkin muncul, yang berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain.

Setelah didapatkan penjelasan dasar mengenai kekosongan hukum dan obyek asuransi dan *muamalat*, bagaimana mengatasi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) mengenai pengaturan konsep dari obyek *takaful* yang terjadi pada organ Fatwa *Takaful*?

Solusi untuk mengatasi terjadinya kekosongan hukum adalah dilakukan kegiatan penemuan hukum. Ruang lingkup penemuan hukum

disini meliputi menjelaskan, melengkapi, dan menciptakan aturan hukum yang sebelumnya belum diatur oleh peraturan perundang-undangan atau produk hukum lain diluar peraturan perundang-undangan.

Untuk menemukan hukum diperlukan metode penemuan hukum. Beberapa metode penemuan hukum yang selama ini sudah dikenal yaitu:¹⁵

1. Metode Interpretasi (Penafsiran)

Interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas atau menyimpang, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum dan mereka yang berhubungan dengan kasus dan peraturan-peraturan hukum.

2. Metode Argumentasi (Penalaran)

Metode argumentasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa yang berhubungan dengan peraturan tersebut bahkan peristiwa lain dan atau peraturan tersebut menyimpang dari koridornya.¹⁶

3. Metode Hukum Bebas

Penemuan hukum bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkrit tertentu sehingga peristiwa berikutnya dapat dipecahkan menurut kaidah yang telah diciptakan oleh hakim.¹⁷

Setelah membicarakan teknik untuk mengatasi kekosongan hukum beserta penjelasan-pejelasan sebelumnya, saatnya penulis menghubungkannya dengan persoalan penelitian mengenai adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam Fatwa *Takaful* di mana tidak ditemukannya penjelasan mengenai obyek yang dapat *ditakafulkan*

¹⁵ Frisca Cristi, **Teori Perundang-Undangan Dan Perjanjian Pada Umumnya, Karakteristik Production Sharing Contract, dan Analisa Hukum Pasal 31 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009**, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2010, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/133545-T%2027892-Akibat%20hukum-Analisis.pdf>, (Diunduh tanggal 30 Desember 2014).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

menurut syariah Islam, lain halnya dengan lawannya, UU Asuransi yang secara gamblang memasukkan obyek asuransinya di dalamnya. Berdasarkan teori di atas, peneliti mempunyai kewenangan untuk mengambil suatu langkah dalam mengatasi *rechtsvacuum* yang diderita Fatwa *Takaful* meskipun sebatas penyaranan rumusan.

Langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam Fatwa *Takaful* mengenai obyek meliputi:

1. Perlu adanya penyempurnaan Fatwa *Takaful* oleh DSN-MUI sebagai pihak yang berwenang terhadap Fatwa *Takaful* tersebut, dalam arti mengoptimalkan *ijtihad* untuk memasukkan unsur-unsur Islami dalam bermuamalat demi merumuskan obyek *takaful* yang dapat dipertanggungjawabkan kehakikiannya menurut syariat Islam. Penyempurnaan tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. DSN-MUI dapat mengadopsi dari konsep pengertian obyek asuransi konvensional yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 UU Asuransi, namun dengan sedikit modifikasi kalimat untuk mengarahkan pada konsep syariah, karena obyek asuransi konvensional bisa terhindar dari larangan Islam apabila pengelolaannya sesuai dengan batas-batas prinsip syariah. Tidak ada sumber hukum Islam yang menyatakan obyek asuransi itu haram. Fatwa *Takaful* dan fatwa pelaksanaannya¹⁸ menjawab persoalan itu dengan:
 - (1) membuat strategi memisahkan antara dana *tijarah* (tujuan komersial) dan dana *tabarru'* (tujuan saling tolong-menolong) berdasarkan akad *mudharabah* untuk *tijarah* dan akad *hibah* untuk *tabarru'*;

¹⁸ a. Fatwa DSN-MUI No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah, selanjutnya disebut Fatwa *Mudharabah Musytarakah*.

b. Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi & Reasuransi Syariah, selanjutnya disebut Fatwa *Wakalah Bil Ujrah*.

c. Fatwa DSN-MUI No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi & Reasuransi Syariah, selanjutnya disebut Fatwa *Tabarru'*.

- (2) diberlakukannya akad *mudharabah musytarakah* (penyertaan modal dalam kerjasama investasi) yang sesuai dengan prinsip syariah;¹⁹ dan
 - (3) adanya akad *wakalah bil ujah* (pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah/fee*).²⁰
- b. DSN-MUI menambahkan atau mencantumkan penganturan mengenai obyek *takaful* dalam Penetapan Pertama Ketentuan Umum Angka 2 menggeser pengertian mengenai akad yang sesuai dengan syariah.
2. DSN-MUI dapat melakukan langkah penemuan hukum seperti penjelasan sebelumnya menggunakan metode penemuan hukum yang tersedia dengan berlandaskan sumber hukum Islam untuk menetapkan obyek asuransi syariah agar pelaku asuransi syariah, khususnya tertanggung tidak bingung dan tidak ragu-ragu dalam ikut serta menggerakkan roda asuransi syariah.

Dari keseluruhan pembahasan penelitian, menunjukkan bahwa konsistensi dari Fatwa Takaful perlu diperhitungkan lagi oleh pemerintah dan masyarakat luas, khususnya umat Islam di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah, DSN-MUI dan semua elemen yang lain untuk sekeras tenaga mengenalkan Fatwa *Takaful* beserta produk asuransi syariah ke masyarakat yang masih awam dengan berbagai cara, misalnya seminar ataupun sosialisasi *door to door*. Minimnya pengetahuan masyarakat akan konsistensi Fatwa *Takaful* yang secara tidak langsung mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan fasilitas asuransi syariah, menjadi pekerjaan rumah bagi DSN-MUI untuk mengatasi salah satu problema tersebut. Langkah legitimasi Fatwa *Takaful* kedalam bentuk peraturan perundang-undangan dari Pemerintah yang berwenang perlu dijadwalkan dan dilaksanakan agar keberadaan Fatwa *Takaful* mempunyai kekuatan hukum yang kuat, di mana selama ini Fatwa *Takaful* hanya sebagai produk hukum yang mengikat pihak yang meminta dibuatnya fatwa tersebut (perusahaan asuransi syariah).

¹⁹ Lihat Fatwa *Mudharabah Musytarakah*.

²⁰ Penetapan Kedua Ketentuan Umum Angka 2 Fatwa *Wakalah Bil Ujah*.

Langkah legitimasi diharapkan dapat membantu mempopulerkan Fatwa *Takaful* seperti halnya UU Asuransi.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dari keseluruhan sebagai berikut:

Konsistensi Fatwa DSN-MUI No:21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah sangat membantu dalam menutupi kekurangan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, khususnya Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, khususnya Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi yang masih cenderung melanggar syariat Islam, yaitu mengandung unsur *gharar* (dalam hal pengelolaan dana premi) dan lebih menguntungkan satu pihak. Namun, Fatwa DSN-MUI No:21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah masih perlu disempurnakan lagi akibat ditemukan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) mengenai obyek *takaful*, dengan mengadopsi dan sedikit modifikasi Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

2. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian skripsi ini, adapun saran dari penulis sebagai berikut:

a. Saran Bagi Akademisi

Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai konsistensi UU Asuransi dalam kajian hukum Islam dan konsistensi Fatwa *Takaful* dalam kiprahnya di dunia asuransi syariah.

b. Saran Bagi Pemerintah

Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap UU Asuransi, khususnya Pasal 1 Angka 1 dengan mempertimbangkan kondisi sosiologis dan kultural di Indonesia.

c. Saran Bagi DSN-MUI

Perlu segera dilakukan perbaikan terhadap Fatwa *Takaful* untuk menutup kekosongan hukum mengenai obyek *takaful* dan kekurangan lainnya.

d. Saran Bagi Masyarakat

Masyarakat harus berhati-hati sebelum ikut serta dalam kegiatan perekonomian dan keuangan di Indonesia, khususnya yang beragama Islam, dengan cara mengetahui apakah peraturan yang melandasinya sudah sesuai dengan kaidah yang layak atau sesuai dengan syariat Islam. Apabila masih ada keraguan, masyarakat sebaiknya memilih fasilitas yang berbasis syariah, misalnya *takaful*, untuk meminimalisir kerugian material dan spiritual.

Daftar Pustaka

Buku dan Literatur

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum Asuransi Indonesia**, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Keempat Tahun 2006.
- Ahmad Wardi Muslich, **Fiqh Muamalat**, Amzah, Jakarta, Cetakan Kedua Tahun 2013.
- H. A. Djazuli dan Yadi Junwari, **Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2002
- Hasan Ali, **Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Historis, Teoritis, dan Praktis**, Kencana, Jakarta, Tahun 2006.
- Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Keenam Tahun 2006.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.

Fatwa & Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

- Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.
- Fatwa DSN-MUI No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah*.
- DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Asuransi & Reasuransi Syariah.
- Fatwa DSN-MUI No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi & Reasuransi Syariah.
- Keputusan DSN-MUI Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI (PD DSN-MUI).

Artikel dalam Jurnal

- Frisca Cristi, **Teori Perundang-Undangan Dan Perjanjian Pada Umumnya, Karakteristik Production Sharing Contract, dan Analisa Hukum Pasal 31 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009**, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2010,

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/133545-T%2027892-Akibat%20hukum-Analisis.pdf>, (Diunduh tanggal 30 Desember 2014).

Skripsi

Euis Lia Karwati, **Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Asuransi Kerugian Syariah (Studi Pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967)**, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah, Tahun 2011,
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/273/1/101540-EUIS%20LIA%20KARWATI-FSH.PDF>, (Diunduh tanggal 14 Juli 2014).

Software Penunjang

Sofyan Efendi, 27 Maret 2006, **HaditsWeb 6.0 (Kumpulan & Referensi Belajar Hadits)**, Tahun 2006.

Situs Internet

DSN-MUI, **Sekilas tentang DSN-MUI** (Online),
<http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas>, (Diakses tanggal 16 Agustus 2014).

Pesantren Virtual oleh Agustianto, 30 Agustus 2014, **Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia** (Online),
http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1096:fatwa-ekonomi-syariah-di-indonesia&catid=8:kajian-ekonomi&Itemid=60, (Diakses tanggal 30 Agustus 2014).